

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arifardhani, Yoyo, 2020, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan (Edisi Pertama)*, Prenadamedia Group, Jakarta;

Campbell, Black Henry, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota;

Darwin, Philips, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta;

Daniri, Mas Achmad dan Esther Roseline, 2021, *Cegah Korupsi Dengan Pendekatan Governance, Risk Management dan Compliance (GRC)*, CV. Andi Offset, Yogyakarta;

Diantha, I. Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta;

Fuady, Munir, 2017, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT Citra Aitya Bakti, Bandung;

Garner, Bryan A., 2014, *"Blackc's law dictionary with guide to Pronunciation"*, Cet. 10, West Publishing, St. Paul;

Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta;

KPK, 2006, *Defenisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Jakarta;

\_\_\_\_\_, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta;

\_\_\_\_\_, 2020, *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta;

Keuangan, Otoritas Jasa, 2023, *Buku Saku Pasar Modal*, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Jakarta;

Kurniawan, Ardeno, 2015, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTE, Yogyakarta;

Klitgaard, Robert, 2005, *Membasmi Korupsi (Edisi Ketiga)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

Kusumo, Bambang Ali, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Unisri Press, Surakarta;

Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur;

Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Dian Pudji Simatupang, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok;

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta;

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Mulyana, Asep N., 2018, *Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, Multi Media Mandiri, Jakarta;

Rusdiana, Erna, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya;

Samsul, Mohamad, 2006, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta;

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Siregar, Padian Adi Salamat, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, Deepublish, Yogyakarta;

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;

Widjajaja, Gunawan, 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUHPerdara, KUHD, dan UUPM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

\_\_\_\_\_, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2002, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah (Edisi Pertama)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung.

## **B. Jurnal**

Butarbutar, Russel, Suhandi Cahaya dan Ismail Rumadhan, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM”, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 9, Nomor 2, 2016;

Dicky J H, “Sejarah Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 4. No. 4, 2020;

Fitria, Annisa, “Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 19 Nomor 1, 2022;

Fitriani Rahmadia, "*Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia.*" *Unram Law Review* Vol. 4, No. 1, 2020;

Hiariej, Edward Omar Sharif, “Asas *Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal*, Volume 21 Nomor 1, 2021;

Gillise, *Canadian Property Law*, dikutip oleh Catherine Brown, Symposium: “*Beneficial Ownership and the Income Tax Act*”, *Canadian Tax Journal*, Vol. 53, 2003;

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 5 No. 1, 2020;

Suhariyanto, Budi, “Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal*, Volume 6 Nomor 3, 2017.

### **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Muib, 2017, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

Sinaga, Leonard Pandapotan, 2019, “*Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

#### D. Internet

Aji, M. Rosseno, Korupsi Jiwasraya Rp.16,8 T, Cuci Uang di Kasino dan Pinisi, <https://nasional.tempo.co/read/1349500/korupsi-jiwasraya-rp-168-t-cuci-uang-di-kasino-dan-beli-pinisi>, diakses pada 11 Maret 2022;

Dwi, Firda, 2023, Rugi Bandar! 4 Kasus Korupsi Pasar Uang Terbesar di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115145635-17-405525/rugi-bandar-4-kasus-korupsi-pasar-uang-terbesar-di-indonesia>, diakses pada hari Minggu, 07 Januari 2023;

*Global Forum On Transparency And Exchange Of Information For Tax Purpose, 2021, Building Effective Beneficial Ownership Frameworks*, [https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit\\_en.pdf](https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit_en.pdf), diakses pada Senin 27 Desember 2023;

Idris, Muhamad, 2021, Ini Kronologi Korupsi Asabri Yang Merugikan Negara 23,7 Triliun, <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini-kronologi-korupsi-asabri-yang-merugikan-negara-rp-23-7-triliun>, Kompas.com, diakses pada hari minggu 07 Januari 2024;

Kompas, 2018, PT. Murakabi Berkantor Di Unit Milik Novanto, <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/05/pt-murakabi-berkantor-di-unit-milik-novanto>, diakses pada hari Senin 27 November 2023;

Natalia, Desca Lidya, 2020, Jaksa Paparkan Kronologis Kasus Jiwasraya Yang Rugikan Negara Rp.16,807 Triliun, <https://kalbar.antaranews.com/berita/421564/jaksa-paparkan-kronologis-kasus-jiwasraya-yang-rugikan-negara-rp16807-triliun>, diakses pada 10 Maret 2022;

OJK, 2019, Hai Calon Investor, Yuk Mengenal Jenis Pasar Modal, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>, diakses pada hari Sabtu, 06 Januari 2024.

## **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 LN Nomor 290 DPNP Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385);

Keputusan Menteri Keuangan tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, KMK No. 696 Tahun 1985.